

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji menjadi bagian penting dalam pengamalan agama Islam sebagai rukun Islam kelima. Umat Islam yang mampu secara material dan dimungkinkan melaksanakannya, wajib mengamalkan ibadah tersebut. Menurut Shodiq, haji merupakan “ziarah/perjalanan ke Makkah dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu, baik di Masjidil Haram, ‘Arafah dsb., guna memenuhi Rukun dan Wajib Haji, sebagaimana dicontohkan Rasulullah ketika hayatnya.”¹

Sebelum ibadah haji dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, umat-umat tertentu telah melaksanakannya terlebih dahulu. Kemudian, Nabi Muhammad mengubah beberapa aspek dalamnya dan lantas menjadi kewajiban bagi umat muslim.² Umat muslim di seluruh dunia melakukan ibadah haji ke satu tempat yang sama, Kabah di Kota Mekah, Saudi Arabia. Demikian pula bagi umat muslim pada masa perkembangan awal Islam di Indonesia.³

¹ Lihat Shodiq, *Kamus Istilah Agama* (Jakarta: Sienttarama, 1988), hlm. 110. Bdk. Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam, Jilid I* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 4. Henry mengartikan “haji” sebagai perjalanan menuju tempat yang diagungkan, semacam penziarahan. Ia juga mengutip konsep haji menurut ahli tafsir Indonesia terkemuka, Quraish Shihab, yang menulis bahwa “Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah, dikenal oleh umat manusia melalui tuntutan agama-agama, khususnya di belahan Timur dunia kita ini.”

² Kathryn Kueny, “Haji”, dalam *Encyclopedia of Islam & the Muslim World*, editor Richard C. Martin (New York: Macmillan Reference USA, 2004), hlm. 529-530.

³ Pada perkembangan Islam awal di Hindia Belanda, untuk mencapai Mekah, mereka harus menempuh dua tahun perjalanan laut. Lihat Abdul Kholiq, “Orang Indonesia yang Pertama Kali Naik Haji”, *Info Mekkah Terkini*, <http://www.makkahweb.com/2013/09/orang-indonesia-yang-pertama-kali-naik.html> (diakses pada 28 April 2017).

Henry Chambert-Loir, sejarawan Perancis yang lama meneliti sejarah dan naskah klasik Nusantara, mengungkapkan bahwa orang pertama yang tercatat melaksanakan ibadah haji ke Mekah adalah Hamzah Fansuri, penyair sufi agung dari pelabuhan Barus, pantai barat Aceh, Sumatra.⁴ Jumlah jemaah haji diduga sempat menurun seiring dengan semakin berkuasanya VOC. Sejak awal abad ke-17, VOC memberlakukan berbagai ketentuan yang mempersulit calon haji dari Nusantara.⁵ Hal itu dikarenakan mereka khawatir dengan semangat pembaruan dan nasionalisme menulari para peziarah dan menyebar di Nusantara.

Namun demikian, tetap ada penduduk muslim Hindia Belanda yang berangkat haji. Alih-alih merasa dipersulit dan berkurang jumlahnya, muslim Hindia Belanda yang berangkat haji malah terus meningkat. Bahkan, pada masa-masa berikutnya, berdasarkan data statistik Pemerintah Kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19, jumlah jemaah haji meningkat secara signifikan.⁶

Dalam sejarah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan pribumi Nusantara, satu yang mencolok perhatian publik pada zamannya adalah haji yang dilakukan oleh Bupati (*Regent*) Bandung RA Wiranatakusumah V pada tahun 1924. Pelaksanaan hajinya menarik karena: Pertama, ia adalah pegawai pemerintah kolonial pertama yang melaksanakan ibadah haji; Kedua, ia diberangkatkan atas bantuan pemerintah kolonial⁷; Ketiga, saat di Mekah ia mendapat suatu

⁴ Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam, Jilid I*, hlm. 6.

⁵ Misalnya, melarang kapal VOC untuk memuat calon jemaah atau melarang Adipati Cianjur dan Temanggung Bogor mengirim utusan ke Mekah. Lih. Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam, Jilid I...* hlm. 35.

⁶ *Op cit.*, hlm. 38.

⁷ "Moeharam Wiranatakoesoemah seorang manoesia biasa. Dia kebetulan mendjadi regent Bandoeng", Surat Kabar *Matahari*, No. 13, 15 April 1942, Tahun ke-3.

penghargaan dari Husain bin Ali, Raja Hijaz dari tahun 1916-1924⁸; Keempat, Wiranatakusumah adalah pribumi muslim pertama yang mencatat perjalanan hajinya secara cukup detail⁹; Terakhir, berbagai peristiwa di sekitar perjalanannya, seperti berangkat tiga bulan lebih awal¹⁰ dari yang lazim dilakukan pada masanya dan menceraikan istrinya melalui telegram di tengah perjalanan.¹¹

Wiranatakusumah V mempunyai nama lengkap Raden Adipati Arya Wiranatakusumah. Putra pasangan Bupati Bandung kesembilan Raden Adipati Kusumadilaga dan Raden Ayu Sukarsih itu lahir pada tanggal 28 November 1888. Aom Muharam, sapaan masa kecil Wiranatakusumah V, mengenyam pendidikan Barat sejak Europeesche Lagere School (ELS) hingga lulus dari Hoogere Burgerschool (HBS) tahun 1910. Aroma Barat dalam proses pendidikannya kian bertambah karena selama menempuh pendidikan, ia tinggal bersama keluarga berkebangsaan Belanda.¹² Wiranatakusumah memang terkenal pintar. Selain mampu berbahasa Sunda dan Melayu, ia pun menguasai bahasa Prancis, Jerman, dan Belanda, berkat pengajaran Snouck Hurgronje secara privat.¹³

Setelah lulus dari HBS, ia bekerja sebagai juru tulis Kecamatan Tanjungsari. Kemudian pada tahun 1911, dipindahkan ke Sukabumi menjadi mantri polisi, dan setahun kemudian menjadi Camat Cibeureum. Sebelum

⁸ Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia* (London dan New York: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 202.

⁹ *Ibid.*, hlm. 202; Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam, Jilid II* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 551.

¹⁰ Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam, Jilid II*, hlm. 565.

¹¹ Mien Soedarpo, *Reminiscences of the Past* (Jakarta: The SEJATI Foundation, 1994), hlm. 11. Lihat halaman berikutnya untuk mengetahui bahwa bahkan Haji Agus Salim pun turut mengecam tindakan Wiranatakusumah V tersebut.

¹² Ajip Rosidi, *Ensiklopedi Sunda* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), hlm. 702.

¹³ Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam, Jilid II*, hlm. 552.

mendapat penghargaan dari Husain bin Ali di Mekah, ia sudah pernah mendapat penghargaan dari asisten residen Mr Homans sewaktu dia menjadi pejabat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Penghargaan itu diberikan kepada Wiranatakusumah atas jasa dan kecakapan pekerjaannya. Pada tahun yang sama, Aom Muharam diangkat menjadi Bupati Cianjur dan mendapat gelar tumenggung.

Muharam Wiranatakusumah menjadi Bupati Cianjur hingga tahun 1920. Pada tahun 1920 ia diangkat menjadi Bupati Bandung. Pada saat menjadi Bupati Bandung itulah ia berangkat ke Mekah untuk mengamalkan ibadah haji dan mendapat "Bintang Istiqlal" dari Husain bin Ali. Sepulang dari Mekah, Wiranatakusumah kerap dipanggil "Kangjeng Haji" atau "Dalem Haji".¹⁴

Wiranatakusumah V berangkat dari Batavia pada tanggal 25 Maret 1924.¹⁵ Masa-masa keberangkatannya adalah masa-masa ketika pergerakan nasional dengan semangat melawan kolonialisme Belanda tengah tumbuh dan mekar. Sejarawan asal Jepang Takashi Siraishi menyebutnya sebagai “zaman partij”.¹⁶ Perlawanan pribumi pada masa-masa itu berganti bentuk dan metode. Organisasi dan politik—yang mereka dapatkan sebagai konsekuensi kebijakan Politik Etis Belanda—menjadi senjata perlawanan.¹⁷ Untuk meluaskan kesadaran perlawanan dan nasionalisme, organisasi-organisasi itu benar-benar memerhatikan peran penting media cetak—baik dalam bentuk surat kabar maupun majalah selain dengan memanfaatkan *vergadering* atau rapat akbar. Mereka menerbitkannya

¹⁴ *Op cit.*, hlm. 703.

¹⁵ Henri Chambert-Loir, *Naik Haji di Masa Silam, Jilid II*, hlm. 565.

¹⁶ Zaman ketika pergerakan bumiputra terpecah karena Central Sarekat Islam (CSI) menerapkan disiplin partai. Lihat Takashi Siraishi, *Zaman Bergerak* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 327.

¹⁷ Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional* (Jakarta: Pembangunan, 1982), hlm. 11.

secara berkala dan diperoleh publik dengan cara berlangganan. Pada zaman partai, pergerakan bumiputra tengah terpecah menjadi partai-partai dan mendeapat tekanan keras dari pemerintah.

Kehadiran media-media yang diterbitkan organisasi-organisasi pergerakan bumiputra ketika itu, turut mewarnai sejarah perkembangan pers di Hindia Belanda. Persebaran informasi dan perspektif yang dikedepankan pada masa itu tidak lagi semata-mata berasal dari lembaga-lembaga resmi pemerintah kolonial, semisal yang biasanya dilakukan *Commissie voor de Volkslectuur* (Komisi untuk Bacaan Rakyat atau biasa disebut Balai Pustaka). Namun juga dari berbagai media yang dikelola organisasi-organisasi pergerakan—baik yang non-kooperatif maupun yang kooperatif dengan Pemerintah Kolonial. Istilah yang lazim diterapkan pada media dan penerbitan di luar lingkungan pemerintah itu adalah “non official”, “partikelir”, atau “liar”.¹⁸

Di Jawa Barat, ketika Wiranatakusumah V menunaikan ibadah haji pada 1924, selain media milik pemerintah seperti Majalah *Pandji Poestaka* (1923-1945) dan *OBOR* (1921-1924), beredar juga media-media partikelir. Beberapa media partikelir itu bersifat umum dan beberapa lainnya berafiliasi dengan organisasi tertentu. *Papaes Nonoman* dan *Pasoendan* yang terbit dari tahun 1919-1940 serta *Sipatahoenan* yang terbit dari tahun 1923-1942, misalnya, merupakan

¹⁸ Lugienna De, “Roman Jarah dina Sastra Sunda”, *Harian Umum Pikiran Rakyat*, 15 Agustus 2016, rubrik Selisik; Atep Kurnia, “Luar Kalang Pamarentah”, *Harian Umum Pikiran Rakyat*, 15 Agustus 2016, rubrik Selisik; lihat juga Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 372, yang memuat pengertian “partikelir” sebagai “bukan untuk umum; bukan kepunyaan pemerintah; bukan (milik).

media-media yang dikelola oleh Paguyuban Pasundan.¹⁹ Di poros lain, ada surat kabar *Matahari* (1918-1924) yang berafiliasi dengan Sarekat Islam (SI).²⁰ Ketika Sarekat Islam terbelah, surat kabar ini berdiri berdampingan dengan surat kabar *Soerapati* (1923-1926), menyokong Sarekat Rakyat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Di luar kelompok mereka beredar secara regional, masih ada surat kabar lain seperti *Sinar Hindia* (1923-1924), *De Locomotief* (1868-1956), *Neratja*, dan lain-lain, yang beredar dalam skala yang lebih luas.

Sebagai pegawai pemerintah dan sosok yang tersohor, keberangkatan Wianatakusumah V tentu diberitakan oleh media yang menjadi corong pemerintah seperti *Obor*, *Pandji Poestaka*, dan *A.I.D Preangerbode*. Namun di samping mereka, terbitan-terbitan umum (dan liar) pun turut memberitakan. Misalnya, *Neratja*, *De Locomotief*, *Sinar Hindia*, *Soerapati*, dan *Matahari*. Masing-masing memiliki cara pandang tersendiri terhadap kepergian Wiranatakusumah V ke Mekah. Ada yang memandang bahwa kepergian Dalem Bandung tersebut memang semata-mata untuk menjalankan ibadah, sebagaimana diberitakan *A.I.D* dan *Locomotief*. Ada juga yang menilai kepergian Dalem Bandung itu memuat kepentingan politik tertentu. Yang terakhir itu dibahas oleh *Sinar Hindia*, *Neratja*, *Soerapati*, dan *Matahari*.²¹

¹⁹ Atep Kurnia, "Luar Kalang Pamaréntah," *Pikiran Rakyat*, 15 Agustus 2016, lembar Selisik.

²⁰ H.G. Budiman, "Catatan Kecil tentang Pergerakan di Bandung; Sarekat Islam & Perjuangan Pers", *Sebuah Catatan Kecil*, <https://hgbudiman.wordpress.com/2013/05/01/catatan-kecil-tentang-pergerakan-di-bandung-sarekat-islam-perjuangan-pers/> (diakses pada 28 April 2017).

²¹ "Moeharam Wiranatakoesoemah seorang manoesia biasa. Dia kebetolan mendjadi regent Bandung", Surat Kabar *Matahari*, 15 April 1924.

Dalam kaitannya dengan pemberitaan kegiatan haji Dalem Bandung Wiranatakusumah V dan hal-hal yang mengitarinya, dua surat kabar terakhir yang disebut tadi, akan menjadi fokus penelitian penulis kali ini.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari pilihan penulis ini. Pertama, pemberitaan mereka berada di luar arus utama pemberitaan kegiatan serupa pada zamannya—terutama pemberitaan media “plat merah” atau “the official”. Perspektif pemberitaan dan aspek yang mereka narasikan dapat membantu menunjukkan kepada kita tentang heterogenitas cara pandang di masyarakat Jawa Barat ketika itu, dan keberanian melawan tatanan yang tengah mapan. Penulis berharap, hasil penelitian ini bisa menjadi semacam pendokumentasian hal-hal tersebut. Kedua, keterbatasan waktu dan finansial, membuat penulis merasa sadar diri harus membatasi penelitian pada dua surat kabar saja. Dengan kata lain, pembatasan bahasan pada cara pandang dua surat kabar ini bertalian dengan keterbatasan sumber yang penulis alami.

Itulah karenanya penulis memilih judul **“Bupati Bandung Naik Haji; Potret Perjalanan Haji Wiranatakusumah V dalam Perspektif Media Partikelir di Bandung Tahun 1924”**. Sekali lagi, sebagaimana telah disebut di atas, peristiwa ibadah haji Wiranatakusumah V dipilih karena peristiwa itu memiliki keistimewaan tersendiri. Wiranatakusumah V merupakan pegawai pemerintah (Bupati, *Regent*) pertama yang berangkat haji dengan dibiayai pemerintah kolonial. Ketika di Tanah Arab pun ia mendapat penghargaan Bintang Istiqlal dari Syarif Mekah kala itu, Husain bin Ali.

Media partikelir yang dimaksud dari judul tersebut adalah terbitan berkala (baik itu berformat surat kabar atau majalah) berbahasa bumiputra, yang tidak termasuk media resmi corong pemerintah dan yang beredar di daerah Jawa Barat. Penulis memilih Surat Kabar *Soerapati* dan *Matahari*, karena dua media itulah yang baru bisa penulis kumpulkan. Terbitan mereka yang penulis gunakan terbatas pada lembaran yang terbit sekitar pelaksanaan ibadah haji Wiranatakusumah V, Maret hingga Oktober 1924. Adapun beberapa surat kabar lain, seperti *Neratja* atau *Obor*, yang penulis ulas sepintas dalam pembahasan, boleh jadi hanya suplemen tambahan saja.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini, penulis mengedepankan dua rumusan masalah. Di antaranya:

1. Bagaimana media-media partikelir di Bandung tahun 1924?
2. Bagaimana pemberitaan media-media partikelir di Bandung tahun 1924 tentang perjalanan haji Wiranatakusumah V?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui keberadaan media-media partikelir di Bandung tahun 1924.
2. Mengetahui pemberitaan media-media partikelir di Bandung tahun 1924 tentang perjalanan haji Wiranatakusumah V.

D. Tinjauan Pustaka

Selama atau dalam penelusuran sumber—yang biasanya terdapat pembagian antara sumber primer dan sumber sekunder—penulis tidak menemukan literatur yang secara spesifik mengangkat topik yang sama dengan yang hendak penulis angkat. Namun demikian, terdapat beberapa literatur baik berbentuk buku maupun artikel yang menyinggung aspek-aspek tertentu dari bahasan penulis. Beberapa literatur tersebut di antaranya:

1. Henri Chambert-Loir, 2013, *Naik Haji di Masa Silam; Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1964*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Buku yang terdiri dari tiga jilid ini merupakan hasil kerja sama antara École française d'Extrême Orient (EFEO), Forum Jakarta-Paris, Perpustakaan Nasional Indonesia, dan Kepustakaan Populer Gramedia. Buku ini merupakan antologi naskah yang berisi kisah orang-orang Indonesia yang pergi haji, sejak menjelang akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20.

Dalam jilid dua, terdapat catatan perjalanan haji yang dibuat Wiranatakusumah, yang menurut Chambert-Loir sendiri merupakan catatan perjalanan haji pertama dari orang Indonesia yang terbilang lengkap. Sebelum menyajikan catatan haji sang bupati, Henri memberi pemaparan mengenai latar belakang, sosok Wiranatakusumah, dan apa yang ia lakukan terhadap naskah tersebut (penyuntingan dan penilaian).

Buku Henry tersebut penulis kira sangat penting karena memuat salah satu sumber primer dalam topik penelitian yang penulis kaji. Sumber primer yang dimaksud adalah catatan perjalanan haji yang ditulis oleh Wiranatakusumah V sendiri.

2. M. Shaleh Putuhena, 2007, *Historiografi Haji Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: LKiS. Buku ini memuat sejarah pengamalan haji di Indonesia. Namun tidak hanya mengisahkan haji yang dilakukan umat muslim Nusantara, ia juga menerangkan sejarah haji sejak masa Nabi Ibrahim, masa setelah Nabi Ibrahim, dan masa Nabi Muhammad. Sumber-sumber utama yang digunakan buku ini di antaranya: Alquran, hadis, *Het Mekkaansche Feest* dan *Mekka In the Latter Part of th 19th Century* karya Snouck Hurgronje, serta disertasi Abdoel Patah yang berjudul *De Medische Zijde van de Bedevaart naar Mekka*. Selain itu, Shaleh juga menggunakan dokumen-dokumen Pemerintah Belanda yang memuat hal-hal yang bertalian dengan haji. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan politik, buku ini turut menerangkan hubungan dagang antara dunia Arab, India, dan Nusantara, yang mendorong penyebaran agama Islam ke Nusantara. Dari sana, terutama sekitar abad ke-17, umat muslim Nusantara mulai ada yang melaksanakan ibadah haji, sekalian melanjutkan studi agama Islam di Hijaz.

Buku ini mengkaji praktik pelaksanaan haji yang dilakukan umat muslim Nusantara (kemudian Indonesia) sejak terbentuknya komunitas

muslim awal hingga pertengahan abad ke-20. Sementara penulis dalam penelitian ini berfokus pada pemberitaan media-media partikel di Jawa Barat yang memberitakan perjalanan haji salah seorang pegawai Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1924. Bagaimanapun, buku Shaleh tersebut berkontribusi dalam penjelasannya tentang pengaruh timbal balik antara haji dan situasi politik, budaya, serta keagamaan masyarakat muslim Nusantara pada pertengahan pertama abad ke-20.

3. Nina Lubis, 1998, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda. Tiga hal menjadi bahasan utama buku ini. Pertama, kaum menak sebagai elit birokrasi tradisional; kedua, gaya hidup kaum menak; ketiga, konsep dan gaya kepemimpinan kaum menak. Menak yang dimaksud dalam buku ini hampir selalu merujuk pada para bupati di Priangan, tidak terkecuali Wiranatakusumah V. Buku yang diberi kata pengantar oleh Bapak Sejarawan Indonesia Sartono Kartodirjo ini mendeskripsikan kehidupan para bupati di Priangan. Dalam pembahasannya, Nina Lubis cukup sering merujuk pada sumber primer dan sekunder, termasuk surat-surat kabar yang sezaman. Termasuk di dalamnya surat kabar partikelir. Mulai dari *Soenda Berita*, *Medan Doenia*, *Sipatahoenan*, *Soerapati*, dan masih banyak lagi.

Dari karya Nina Lubis ini penulis bisa mendapat gambaran mengenai media-media yang aktif pada masa Wiranatakusumah V menjadi Bupati Bandung dan naik haji ke Mekah.

4. Tito Wardani, 2016, *Mengabarkan Gerakan; Surat Kabar Anti-Kolonialisme 1920-1926*, Bandung & Ciamis: Kentja Press. Buku ini sebelumnya merupakan tesis yang dibuat Tito untuk meraih master di Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung. Metode yang ia gunakan dalam buku tersebut, sepenuhnya menggunakan metode sejarah. Ia membagi bukunya kepada lima bahasan: pendahuluan; pertalian kebangkitan nasional dengan kebangkitan surat kabar; kelahiran Surat Kabar *Soerapati*, sosok intelektual di baliknya serta bahasa yang digunakannya; perlawanan yang dimuat *Soerapati*; dan akhir hayat Surat Kabar *Soerapati* yang di-*beslag* pemerintah kolonial.

Bagi topik penelitian yang penulis kaji, buku Tito tersebut berguna karena cukup banyak memaparkan hal ihwal mengenai Surat Kabar *Soerapati*. Baik itu sejarah kemunculannya hingga *Soerapati* harus dibredel pemerintah kolonial, ataupun aneka ragam konten dan penulis yang termuat dalam surat kabar tersebut.

5. Takashi Siraishi, 1997, *Zaman Bergerak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Takashi mengambil fokus penelitian historisnya pada periode pergerakan yang terjadi di Surakarta dan sekitarnya—termasuk Semarang dan Yogyakarta—tahun 1912-1926. Periode tersebut dipilih karena pada masa itulah “embrio” pergerakan yang meningkatkan kesadaran nasional mulai terbangun dalam bentuknya yang lebih modern: organisasi. Penulisannya yang khas, sebagaimana peneliti-peneliti Jepang, menunjukkan kedetilan yang luar biasa dan tidak

terjebak oleh klasifikasi sosiologis dan ideologis yang dianggapnya “serampangan” dalam kepenulisan sejarah nasional ortodoks. Dari buku ini, penulis mendapat sedikit banyak acuan tentang perkembangan dan polarisasi pergerakan rakyat, dengan instrumen perluasan kesadaran yang digunakan pergerakan rakyat: surat kabar.

6. Asep Sofiawan Rozal, 2012, Tesis, *Peranan R. A. A. H. M. Wiranatakusumah V Sebagai Bupati Bandung dalam Pengembangan Umat Islam pada Masa Kolonial Belanda, Fasis Jepang dan Kemerdekaan*. Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati. Tesis ini memuat berbagai kebijakan dan tindakan yang ditempuh Wiranatakusumah V untuk, dalam istilah Asep, “pengembangan umat Islam.” Peran Wiranatakusumah V sewaktu menjabat bupati merupakan titik awal pembahasannya untuk kemudian melaju pada fase kehidupan Wiranatakusumah V berikutnya yang dianggap berkontribusi terhadap pengembangan umat Islam: masa fasis Jepang dan pasca kemerdekaan.

Kendati sama-sama membahas Wiranatakusumah V, tesis Asep dan penelitian saya memiliki banyak perbedaan. Perbedaan yang utama terletak pada fokus penelitian, termasuk juga pada aspek spasial maupun temporal. Ia berfokus pada kontribusi Wiranatakusumah V bagi pengembangan umat Islam pada tiga periode tertentu. Sedangkan saya tidak berfokus pada hal itu, dan lagi aspek temporal penelitian penulis jauh lebih singkat, sekitar tahun 1924 saja. Aspek spasial pun

berbeda, karena pembahasan Asep mengenai Wiranatakusumah V pada masa pasca kemerdekaan, berarti membahas aktivitas sang tokoh ketika sang tokoh menjabat menteri negara.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, metode yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Menurut profesor sejarah di Fakultas Emeritus Davidson College, Amerika Serikat, Robert C. Williams, penelitian sejarah (*historical research*) adalah sebuah proses pencarian dan penyusunan. Sejarawan bertugas menginvestigasi apa yang terjadi di masa lampau dengan meneliti bukti-bukti yang tersedia, dengan tujuan menyusun fakta-fakta dan kronologi suatu peristiwa.²²

Dalam *The Historian's Toolbox*, Williams menulis bahwa bukti-bukti yang bisa dijadikan pijakan dalam penelitian sejarah, mencakup rekaman tertulis dan rekaman tidak tertulis. Rekaman tertulis itu di antaranya ialah arsip, manuskrip, peta, dan berbagai dokumen lainnya—termasuk buku. Sedangkan rekaman tidak tertulis di antaranya ialah foto, lukisan, koin, rekaman suara, tape, video, *hard drives* komputer, dan lain sebagainya.

Sejarawan Kuntowijoyo, dalam *Pengantar Ilmu Sejarah* (2013) membagi penelitian sejarah menjadi lima tahap. Tahap-tahap itu di antaranya: “(1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber [heuristik], (3) verifikasi (kritik sejarah,

²² Robert C. Williams, *The Historian's Toolbox; Student's Guide to the Theory and Craft of History* (New York: M.E. Sharpe, 2007), hlm 11.

keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan [historiografi].²³

Menurut Kuntowijoyo, memilih topik adalah pekerjaan pertama sejarawan, sebab tanpa topik, pekerjaan selanjutnya tidak akan bisa dikerjakan.²⁴ Hal itu sudah penulis lakukan. Alasan-alasan di balik pemilihan topik ini telah penulis kemukakan pada bagian latar belakang rencana penelitian ini. Barangkali, yang perlu dikemukakan kemudian adalah langkah-langkah penelitian mulai dari heuristik hingga historiografi.

1. Heuristik

Pengumpulan sumber atau heuristik kerap juga diartikan sebagai proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subjek atau topik penulisan yang dipilih.²⁵ Menurut Louis Gottschalk, heuristik sejarah tidak berbeda dengan kegiatan bibliografis secara umum, sejauh menyangkut buku-buku yang tercetak. Selain harus dengan sejarah yang akan ditulis, sejarawan juga harus banyak menggunakan banyak bahan material yang tidak terdapat di dalam buku-buku.²⁶

Saat atau dalam penulisan sumber, kemudian biasanya ada pembagian antara sumber primer dan sumber sekunder. Definisi yang cukup memadai bisa kita lihat dalam buku Louis Gottschalk, *Mengerti*

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Edisi Baru, Cetakan. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 129.

²⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 42.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42; *Op cit.*, hlm. 73.

Sejarah. Di sana ia mendefinisikan sumber primer sebagai “kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya”, atau dengan kata lain, “saksi pandangan mata.”²⁷ Kemudian ia melanjutkan bahwa sumber primer harus dihasilkan oleh seorang yang sezaman dengan peristiwa yang bersangkutan.

Sedangkan sumber sekunder, menurut Gottschalk, merupakan kesaksian daripada siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.²⁸ Sumber sekunder ini bisa berbentuk buku atau bentuk dokumentasi lainnya yang merujuk pada sumber primer.

Sumber-sumber primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari Perpustakaan Nasional, Jakarta. Sebagian sumber lagi penulis dapatkan dari perpustakaan pribadi Atep Kurnia, peneliti literasi dan kesusastraan Sunda yang berdomisili di Bandung. Selain dua tempat itu, penulis juga mendapat beberapa sumber sekunder dari perpustakaan pribadi penulis, perpustakaan kawan, Rumah Baca Buku Sunda di Ciwastra, Bandung, dan sisanya dari internet.

²⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 43.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

a. Sumber Primer

Melihat topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber-sumber primer yang telah penulis pegang di antaranya:

- 1) “Wiranata-koesoemah... selenting bawaning angin”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 10, 22 Mei 1924.
- 2) K.A. “Kaanehan Hadji Wiranatakoesoemah Bandoeng”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 15, 16 Agustus 1924.
- 3) Moh Sanusi. “Pertimbangan Hadji Wiranatakoesoemah! Koering nanggoeng djawab”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 15, 16 Agustus 1924.
- 4) Awewe. “Hadji Wiranatakoesoemah pro Neng Oekoen Anti Sarifah”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 17, 9 September 1924.
- 5) K.A. “Moeharam Wiranatakoesoemah (Hadji), Manehna meunang bintang, Eta bintang pamerena Hoesein Radja Mekkah noe koe Wahabi Dioesir”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 22, 18 Oktober 1924.
- 6) “Wira, Regent Bandoeng akan moedja semedi? Pantas...”. Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 10, 17 Maret 1924.
- 7) “Moh. Sanoesi contra Wiranatakoesoemah. Si melarat contra si kaja”. Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 10, 17 Maret 1924.

- 8) “Moeharam Wiranatakoesoemah seorang manoesia biasa. Dia kebetulan mendjadi regent Bandoeng”. Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 13, 15 April 1924.
- 9) “Rajat boleh perhatikan! Rajat boleh timbang! Setrijakah itoe namanja?” Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 13, 15 April 1924.
- 10) “Sekali lagi tentang toean Wiranatakoesoemah”. Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 16, 26 Mei 1924.
- 11) “Salamet Djalan !” Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 4, April 1924.
- 12) “Roepa-roepa kaanehan. Kandjeng Dalem Bandoeng djengkar ka Mekah”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 4, April 1924.
- 13) “Kandjeng Dalem Bandoeng meunang kahormatan ti Radja Mekah (Sjarief Hoessein)”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 5, Mei 1924.
- 14) “Kangdjeng Dalem Bandoeng Angkat ka Mekah”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 8, Agustus 1924.
- 15) “Nagara Mekah diroeksak Kaoem Wahabi”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 9-10, September-Oktober 1924.
- 16) “Perang di Arab”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 9-10, September-Oktober 1924.
- 17) “Saha Sjarief Hossein teh?” Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 11-12, November-Desember 1924.

- 18) “Kariboetan di Mekah”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 11-12, November-Desember 1924.
- 19) “Moenggah Hadji”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 11-12, November-Desember 1924.
- 20) “De Regent-Hadji terug uit Mekka.” *De Indische Courant*, 3e Jaargang, No. 271, 8 Agustus 1924.

b. Sumber Sekunder

- 1) Catatan perjalanan haji Wiranatakusumah V: “Perjalanan Saya ke Mekah” dalam Henri Chambert-Loir, 2013, *Naik Haji di Masa Silam, Jilid II*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 571-664.
- 2) Tito Wardani, 2016, *Mengabarkan Gerakan; Surat Kabar Sunda Anti-Kolonialisme*, Bandung-Ciamis: Kentja Press.
- 3) Ajip Rosidi, 2000, *Ensiklopedi Sunda*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- 4) Takashi Siraishi, 1997, *Zaman Bergerak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

2. Kritik

Setelah mengumpulkan sumber atau melakukan proses heuristik, langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber. Istilah lain kritik sumber adalah verifikasi sumber. Dinamai demikian karena

pada praktiknya, kritik sumber adalah verifikasi atau pengujian keabsahan dan otentisitas sumber.²⁹

Uraian praktis mengenai tahapan ini, saya dapatkan dari buku *Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sejarah dan Peradaban Islam* (2015).³⁰ Dalam buku yang disusun Ading Kusdiana dan Samsudin itu diterangkan cara melakukan kritik intern dan kritik ekstern, dua hal penting dalam proses verifikasi sumber.

Kritik ekstern, yang bertujuan mengetahui keaslian sumber, dapat dilakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, *apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki?* Di sini, peneliti harus memperhatikan titi mangsa penulisan atau penerbitan sumber, bahan atau materi sumber, identifikasi *watermark*, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, *apakah sumber tersebut asli atau turunan?* Dan ketiga, *apakah sumber itu utuh, sebagian, atau telah berubah?*

Selanjutnya adalah kritik intern. Dalam buku yang sama, disebutkan bahwa kritik intern ini bertujuan untuk mengetahui kredibilitas sumber. Mengutip E Kosim dan Nina H Lubis, Ading dan Samsudin³¹ mengutarakan tiga kegiatan pokok dalam proses kritik intern. Pertama, menilai sumber secara intrinsik (sifat sumber, sosok pengarang, kedekatan sumber dengan peristiwa). Kedua, komparasi atau membanding-

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu*, hlm. 77.

³⁰ Ading Kusdiana & Samsudin, *Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sejarah dan Peradaban Islam* (Bandung: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati, 2015).

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

bandingkan sumber. Ketiga, melihat korbokasi atau sifat saling dukung antarsumber.

a. Kritik Intern

Pada tahap kritik intern, dapat penulis sampaikan bahwa penulis telah memerhatikan sifat sumber, sosok, pengarang, serta kedekatan sumber dengan peristiwa. Seluruh sumber-sumber itu dekat dengan peristiwa. Itu penulis simpulkan setelah penulis memerhatikan waktu penerbitan dan pihak yang menerbitkan sumber. Proses komparasi atau membandingkan sumber pun telah dilakukan, meskipun kurang optimal. Hal itu dikarenakan sumber pembandingan cukup sulit diperoleh.

Tahap korbokasi pun telah dilalui. Hal itu dilakukan dengan cara membandingkan sumber primer dan sumber sekunder. Sehingga dapat dilihat kesesuaian pada beberapa informasi dalam sumber sekunder dengan informasi dalam sumber primer.

b. Kritik Ekstern

Berdasarkan panduan tersebut, penulis ingin mengatakan bahwa dari seluruh sumber primer yang terkumpul, tidak semua merupakan sumber yang dikehendaki atau relevan dengan pembahasan. Sumber-sumber yang tergolong primer dan dikehendaki di antaranya:

- 1) “Wiranata-koesoemah... selenting bawaning angin”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 10, 22 Mei 1924.

- 2) K.A. “Kaanehan Hadji Wiranatakoesoemah Bandoeng”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 15, 16 Agustus 1924.
- 3) Moh Sanusi. “Pertimbangan Hadji Wiranatakoesoemah! Koering nanggoeng djawab”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 15, 16 Agustus 1924.
- 4) Awewe. “Hadji Wiranatakoesoemah pro Neng Oekoen Anti Sarifah”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 17, 9 September 1924.
- 5) K.A. “Moeharam Wiranatakoesoemah (Hadji), Manehna meunang bintang, Eta bintang pamerena Hoesein Radja Mekkah noe koe Wahabi Dioesir”. Surat kabar *Soerapati*, tahun ke-2, no. 22, 18 Oktober 1924.
- 6) “Wira, Regent Bandoeng akan moedja semedi? Pantas...”. Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 10, 17 Maret 1924.
- 7) “Moeharam Wiranatakoesoemah seorang manoesia biasa. Dia kebetulan mendjadi regent Bandoeng”. Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 13, 15 April 1924.
- 8) “Rajat boleh perhatikan! Rajat boleh timbang! Setrijakah itoe namanja?” Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 13, 15 April 1924.
- 9) “Sekali lagi tentang toean Wiranatakoesoemah”. Surat kabar *Matahari*, tahun ke-3, no. 16, 26 Mei 1924.

- 10) “Salamet Djalan !” Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 4, April 1924.
- 11) “Roepa-roepa kaanehan. Kandjeng Dalem Bandoeng djengkar ka Mekah”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 4, April 1924.
- 12) “Kandjeng Dalem Bandoeng meunang kahormatan ti Radja Mekah (Sjarief Hoessein)”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 5, Mei 1924.
- 13) “Kangdjeng Dalem Bandoeng Angkat ka Mekah”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 8, Agustus 1924.
- 14) “Moenggah Hadji”. Surat kabar *OBOR*, tahun ke-3, no. 11-12, November-Desember 1924.

Jadi, dari dua puluh sumber yang tergolong primer, terdapat empat belas di antaranya yang termasuk relevan atau dikehendaki dalam topik penelitian. Kendati begitu, bukan berarti sumber primer yang tidak relevan menjadi tidak berguna. Mereka tetap bermanfaat dalam posisinya sebagai penjelas konteks dan/atau pengaya topik pembahasan. Namun, sumber-sumber tersebut bukanlah sumber asli. Sumber-sumber itu, dalam istilah yang digunakan Ading dan Samsudin, adalah “sumber-sumber turunan”. Surat Kabar *Soerapati*, *Matahari*, dan *OBOR* yang penulis peroleh, bukan lagi surat kabar dalam bentuknya yang cetakan kertas. Melainkan sudah dikonversi menjadi mikrofilm. Itulah yang tersedia di Perpustakaan Nasional dan perpustakaan pribadi Atep Kurnia. Mengingat surat-surat kabar itu sudah cukup tua dan rentan mengalami kerusakan.

Terus terang, perlu penulis sampaikan, bahwa sumber-sumber primer yang penulis peroleh, kondisinya sudah tidak utuh lagi. Tampilan fisiknya pun tampak ada perubahan. Maksudnya, terdapat coretan-coretan di beberapa judul tulisan.

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian sejarah adalah interpretasi. Interpretasi atau penafsiran itu dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah lolos tahap kritik atau verifikasi sumber.³² Penafsiran dalam penelitian sejarah dapat dibagi menjadi dua kategori atau dapat dilakukan dengan dua cara: analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan atau memadukan.³³ Fakta-fakta yang diperoleh juga bisa ditafsir secara verbal, teknis, logis, faktual, dan psikologis.

Pada tahap ini, penulis melakukan penafsiran atas fakta-fakta sejarah yang termuat dalam Surat Kabar *Soerapati* dan *Matahari*. Terutama, fakta-fakta yang memuat atau menyangkut perjalanan haji Wiranatakusumah V. Mengingat tahun terbitnya, dua surat kabar itu terbit pada masa-masa ketika ejaan yang digunakan adalah ejaan Van Ophuijsen yang berlaku di Hindia Belanda sejak awal abad ke-20.³⁴ Di samping

³² *Ibid.*, hlm. 31.

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu*, hlm. 78; bdk Robert C. Williams, *The Historian's Toolbox*, hlm. 186. Pada seksi *glossary*, Williams mengartikan "interpretation" sebagai "sebuah kesimpulan berdasarkan pada bukti yang berarti." Lalu ia menambahkan bahwa setiap sejarawan boleh jadi memiliki interpretasi yang berbeda atas bukti/sumber yang sama.

³⁴ Henri Chambert-Loir, *Iskandar Zulkarnain, Dewa Mendu, Muhammad Bakir dan Kawan-Kawan: Lima Belas Karangan tentang Sastra Indonesia Lama* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 200.

masalah ejaan, khusus untuk Surat Kabar *Matahari*, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahasanya yang masih lekat dengan nuansa “Melayu Pasar.” Sedangkan Surat Kabar *Soerapati* menggunakan bahasa Sunda, dengan ejaan Van Ophuijsen.

Setelah melakukan analisa, penulis akan melakukan sintesa atas fakta-fakta yang tersedia dalam kedua surat kabar tersebut. Fakta-fakta yang termuat dalam dua surat kabar tersebut akan penulis padukan, sehingga lahir satu fakta baru yang tersusun dari dua sumber primer tersebut. Sejarah berusaha memahami dan menjelaskan peristiwa masa lalu dengan cara menginterpretasi makna yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut, sejarawan—dengan segala bias yang dimiliki dan mesti disadarinya—harus tetap berusaha objektif, dalam upayanya untuk memahami dan berempati pada individu atau peristiwa di ruang dan waktu yang berbeda.³⁵ Demikian dikemukakan oleh sejarawan Amerika Serikat, Robert C. Williams.

Apa yang penulis lakukan dalam penelitian ini pada dasarnya sama dengan apa yang diutarakan sejarawan tersebut: memahami dan berempati. Untuk memahami narasi perjalanan haji Wiranatakusumah V yang dibangun dua media partikelir terpilih, *Soerapati* dan *Matahari*, penulis akan mencobanya dengan cara membaca dan menyerap konteks pada masanya yang terdapat, atau bisa kita upayakan, dalam sumber-sumber sekunder yang berkonten lebih luas.

³⁵ Robert C. Williams, *The Historian's Toolbox*, hlm. 12.

Teori yang penulis gunakan untuk mendekati pecahan-pecahan *puzzle* dalam penelitian ini adalah analisis wacana, khususnya analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* (CDA). Analisis wacana banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dai sosiologi, linguistik, psikologi sosial, bahkan ilmu politik, khususnya politik bahasa.³⁶ Sebagai alternatif dari analisis isi—selain analisis isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai—analisis wacana lebih menyoroti aspek “bagaimana” pesan atau teks komunikasi disampaikan, ketimbang berusaha menjawab pertanyaan “apa” pesan itu. Karenanya, dengan analisis ini kita tidak hanya mengetahui bagaimana isi suatu teks/berita, melainkan juga mengetahui bagaimana teks itu disampaikan.³⁷

Dalam analisis wacana kritis atau analisis wacana yang dilihat dalam paradigma kritis, analisis lebih ditekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi dalam proses produksi dan reproduksi makna.³⁸ Dengan kacamata ini, karena teks/bahasa sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, wacana tidak dilihat sebagai sesuatu yang netral, dan individu tidak dianggap sebagai subjek yang bisa menafsirkan secara bebas seenak pikirannya.

Analisis wacana kritis memiliki sejumlah karakteristik. Eriyanto, berdasarkan kajian para ahli seperti Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan

³⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Bantul: LKiS Yogyakarta, 2015), hlm. 3.

³⁷ *Ibid*, hlm. xv.

³⁸ *Ibid*, hlm. 6.

Wodak, menuliskan setidaknya ada lima karakter (sekaligus prinsip) yang biasa termuat dalam analisis wacana kritis.³⁹

Karakter pertama adalah wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau *action*, yang dengannya wacana bisa diartikan sebagai bentuk interaksi. Akibatnya, pertama, wacana dipandang senantiasa memiliki motif—entah untuk mempengaruhi pendapat publik, mendebat, membujuk, dan sebagainya—dan, kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar serta terkontrol. Karakter kedua analisis wacana kritis selalu mempertimbangkan konteks seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi saat wacana itu beredar. Bukan hanya itu, konteks juga memuat siapa pihak dan kenapa pihak itu mengekspresikan suatu hal, siapa segmentasinya, apa mediumnya, dan bagaimana hubungan berbagai pihak yang terlibat.⁴⁰

Karakter ketiga, analisis wacana kritis menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, khususnya konteks historis tertentu. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam proses analisisnya, tinjauan atas mengapa wacana yang berkembang/dikembangkan/dipakai sedemikian rupa, penting memuat aspek kesejarahan. Karakter keempat, analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan (*power*). Dengannya, setiap wacana yang muncul dilihat sebagai bagian dari pertarungan kekuasaan. Karakter kelima ialah ideologi. Dalam hal ini wacana dipandang sebagai

³⁹ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 8-9.

medium kelompok tertentu (yang dominan maupun yang minoritas) mempersuasi dan mengkomunikasikan pandangan kelompok, termasuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota kelompok.⁴¹

Dalam cakupan penelitian ini, terlebih dalam kaitannya dengan teori konflik, penulis pun merasa perlu mengemukakan konsep “bupati”. Penjelasan tentangnya penulis peroleh dari Sobana Hardjasaputra di salah satu *Seri Sundalana* terbitan Pusat Studi Sunda.⁴² Menurutnya, istilah “bupati” berasal dari bahasa Sansakerta. Istilah tersebut merupakan perpaduan dari kata *bhu* dan *pati*: *bhu* berarti “bumi” atau “tanah”, sedangkan *pati* berarti “tuan”, “pemilik” atau “penguasa”. Maka, secara harfiah “bupati” bisa diartikan sebagai pemilik atau penguasa bumi atau tanah, yang berarti raja.⁴³

Sebagaimana ditulis Sobana, dalam sistem pemerintahan tradisional Jawa, baik itu di Yogyakarta maupun di Surakarta, bupati berarti pegawai tinggi istana. Sebutan bupati biasanya digabungkan dengan nama jabatan, seperti *bupati jaksa*, *bupati gladag*, *bupati gedong*, dan lain sebagainya. Ada dua macam sebutan bupati pada zaman Mataram. Pertama, *wedana bupati*, bupati yang mengepalai sejumlah bupati, atau kepala daerah yang mengepalai sejumlah bupati dalam wilayah tertentu.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 10-14.

⁴² Sobana Hardjasaputra, “Bupati di Priangan: Kedudukan dan Perannya pada Abad ke-17 – Abad ke-19”. Dalam *Seri Sundalana 3: Bupati di Priangan dan Kajian Lainnya mengenai Budaya Sunda* (Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda, 2004), hlm. 9-65.

⁴³ *Ibid*, hlm. 12.

Kedua, *bupati* saja, bupati yang mengepalai dan memimpin daerah kabupaten di wilayah mancanegara (luar lingkaran dalam keraton).

Kehadiran dan mapannya pemerintah kolonial Hindia Belanda turut mengubah peran dan fungsi bupati. Para bupati merupakan golongan yang pertama-tama merasakan langsung pengaruh kekuasaan kolonial, karena merekalah yang berhadapan langsung dengan para penguasa baru tersebut. Kedudukan bupati jadi agak tergeser, dari penguasa daerah yang otonom menjadi pegawai pemerintah kolonial dan perantara politik alias alat kekuasaan asing. Pada masa ini, bupati merupakan “pegawai” yang memangku jabatan kepala daerah—yang dalam menjalankan pemerintahannya didampingi oleh asisten residen—berada di bawah perintah residen.⁴⁴

Selanjutnya Sobana menjelaskan hubungan bupati dengan rakyatnya pada zaman Hindia Belanda. Menurutnya, hubungan antara bupati dan rakyat terjalin dalam ikatan feodal-tradisional, yang melembaga menjadi tradisi, sehingga terjadi hubungan “tuan-hamba”. Sebagai kepala daerah suatu kabupaten, bupati memiliki dua fungsi dan peran yang saling berlainan satu sama lain. Di satu sisi ia menjadi objek kekuasaan pemerintah kolonial, di sisi lain, ia jadi pemegang kuasa yang mana rakyat menjadi objek kekuasaannya.

Kekuasaan tradisional yang diemban bupati, selain berasal dari legitimasi pemerintah kolonial, juga berasal dari struktur sosial yang

⁴⁴ *Ibid.*

tersusun berdasarkan kelahiran, kekayaan, dan status. Alih-alih menghapus tiga komponen kolonial tersebut, pemerintah kolonial malah kerap memaparkannya dengan memberikan simbol-simbol status dan atribut kebesaran, tanda-tanda jasa, dan lain sebagainya.⁴⁵ Pemerintah kolonial tampaknya mafhum, keberhasilan eksploitasi ekonomi-politik mereka terhadap tanah jajahan, bergantung pada kemampuan bupati mempengaruhi dan menggerakkan rakyatnya—yang mana hal itu bergantung pada kekuasaan tradisional bupati. Di samping itu, para bupati juga bergantung pada kebijakan pemerintah kolonial. Jika tidak menghendaki kedudukannya lenyap, mereka harus menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah kolonial dengan cara menjalankan kebijakan kolonial dengan sebaik-baiknya.⁴⁶

4. Historiografi

Setelah melalui empat tahapan tadi, barulah dilakukan penulisan atau historiografi. Ading dan Samsudin menyebut historiografi sebagai “langkah (sejarawan) menuliskan hasil penelitiannya.”⁴⁷ Sebagaimana dianjurkan Kuntowijoyo,⁴⁸ penulisan hasil penelitian ini disusun secara kronologis dan sedikitnya mempunyai tiga bagian pokok. Tiga bagian pokok itu di antaranya: pengantar (pendahuluan), isi atau hasil penelitian (pembahasan), dan kesimpulan.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14-16.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁷ Ading Kusdiana & Samsudin, *Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi*, hlm. 32.

⁴⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 80-81.

Dalam penelitian ini, bagian pengantar atau pendahuluan, akan penulis muat dalam Bab I. Di dalamnya, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan langkah-langkah penelitian yang penulis lalui.

Bagian selanjutnya, pembahasan atau isi dan hasil penelitian, terdapat dalam Bab II dan Bab III. Bab II akan dimulai dengan uraian tentang konteks historis. Baik konteks Hindia Belanda, maupun konteks Bandung secara khusus. Konteks yang penulis angkat di antaranya: kondisi geografis Bandung, sejarah Bandung dari masa ke masa, hingga Bandung tahun 1920-an. Bab II lantas akan ditutup dengan uraian tentang keberadaan media-media partikelir yang ada di Bandung tahun 1920-an, termasuk *Soerapati* dan *Matahari*.

Pada Bab III, penulis akan menyajikan narasi yang dibangun *Soerapati* dan *Matahari* atas peristiwa perjalanan haji Wiranatakusumah V. Penulis akan mencoba menarasikannya kembali berdasarkan sintesa atas fakta-fakta yang sebelumnya telah dikemukakan dua media tersebut. Di samping itu, penulis akan mencoba melihat faktor-faktor yang menyebabkan narasi mereka dibuat sedemikian rupa.

Setelah itu, penulis akan menutup hasil penelitian dengan kesimpulan. Bagian penutup itu akan penulis sampaikan dalam Bab IV. Sebagai pertanggungjawaban akademik, setelah menutup hasil penelitian dengan kesimpulan, penulis akan menyajikan sumber-sumber yang penulis

gunakan terkait penelitian ini dalam bagian Daftar Pustaka. Sumber-sumber penting yang terdapat dalam Daftar Pustaka itu akan penulis lampirkan dalam bagian Lampiran.

Dalam bagian ini, penulis merasa perlu mengungkapkan soal pilihan penulisan atau pengucapan nama sosok utama yang hendak kita bahas. Surat kabar berbahasa Belanda, *Indische Courant*, menyebutnya nama Bupati Bandung dengan “Wira Nata Koesoema.” Sedangkan surat kabar lokal seperti *Matahari*, *Soerapati*, *Sinar Hindia*, dan lain sebagainya, menggunakan “Wiranatakoesoema.” Dalam karya tulis ini penulis memilih menggunakan “Wiranatakusumah,” sebagaimana digunakan Nina Lubis,⁴⁹ *Ensiklopedi Sunda*,⁵⁰ dan Iip D. Yahya.⁵¹ Sisanya, pengucapan nama orang, kota, organisasi, dan tempat, akan memakai ejaan modern, kecuali kutipan langsung.



⁴⁹ Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942* (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998).

⁵⁰ Ajip Rosidi, *Ensiklopedi Sunda*, hlm. 702-703.

⁵¹ Iip D. Yahya, *R.A.A.H.M. Wiranatakusumah V: Kedalaman yang Belum Terselami* (Bandung: Yayasan Wiranatakusumah, 2011).